

**PENGARUH INFRASTRUKTUR, TENAGA KERJA DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN TERHADAP SUMBER DAYA MANUSIA
DI KALIMANTAN BARAT**

TUGAS AKHIR



**RISKA ANISSA
NIM B1011191036**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2023**

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Riska Anissa
NIM : B1011191036
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA : Pengaruh Infrastruktur, Tenaga Kerja dan
Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan
Kesehatan Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia
di Kalimantan Barat.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustakasesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 07 Juni 2023

Riska Anissa
NIM. B1011191036

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Riska Anissa
NIM : B1011191036
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Infrastruktur dan Tenaga Kerja Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 07 Juni 2023

Riska Anissa
NIM B1011191036

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Infrastruktur, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah
Bidang pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kualitas Sumber Daya
Manusia di Kalimantan Barat

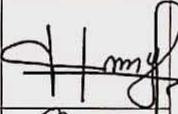
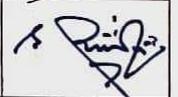
Penanggung Jawab Yuridis



Riska Anissa
B1011191036

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 10 Mei 2023

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1	Pembimbing TA	Helly Suharlina, S.E., M.M.	30/5-2023	
		196111061986032003		
2	Ketua Penguji	Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si.	30/5-2023	
		196205251987031002		
3	Anggota Penguji	Dr. Sri Kurniawati, S.E., M.Sc.	22/5-2023	
		197602082005012002		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 9 JUNI 2023
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



Dr. Erni Pancek Kurniasih, S.E., M.Si.
NIP 197206071998032001

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya yang telah meridhoi dan memberikan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Pengaruh Infrastruktur dan Tenaga Kerja Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat”** yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan program studi Sarjana Ekonomi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak dan tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, saran dan masukan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan tugas akhir. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada :

1. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Helly Suharlina, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan bimbingan, nasihat, kritik serta motivasi bagi saya, dari awal perkuliahan hingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji Utama saya yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

6. Ibu Dr. Sri Kurniawati, S.E., M.Sc. selaku Dosen Penguji kedua saya yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
7. Seluruh Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan, serta pengalaman berharganya selama proses perkuliahan.
8. Seluruh Staff Akademik, Tata Usaha, Staff Perpustakaan, dan seluruh pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah membantu dalam proses administrasi demi kelancaran penulisan Tugas Akhir ini.
9. Secara khusus kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Karnain dan Ibu Ely Satriana S.Pd yang telah banyak berjasa dan tiada hentinya memberikan doa, kasih sayang, semangat, saran dan motivasi serta dukungan moril maupun materil disetiap langkah perjuangan saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Teruntuk adik-adik saya yang sangat saya sayangi yaitu Mutia Dewi dan Shahira Safanisa yang telah memberikan doa serta semangat dalam Menyusun Tugas Akhir saya.
11. Teruntuk pasangan saya yaitu Sertu Rio yang telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi kritikan, saran serta selalu menasehati saya agar tidak bermental lemah, dan menjadi tempat berkeluh kesah dalam menyusun Tugas Akhir saya.
12. Teruntuk Sabila Aqmarina, Riska Almadinanti, Suci Hartati, Aulia Rani Laksmibay, Gunarsih, Widuri dan Nita Kandini, yang telah menjadi teman seperjuangan, terima kasih sudah selalu membantu dan menemani saya dalam proses belajar sampai menyusun Tugas Akhir serta menjadi tempat berkeluh kesah.
13. Teruntuk teman saya Gina Rania, Surtika Sari dan Sheva Readyanda Purnomo yang telah menjadi tempat berkeluh kesah saya.
14. Kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2019 yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan.

15. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah berkontribusi dalam membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
16. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena telah berjuang sampai di titik ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan dapat pula dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Mengingat masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini kurang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun serta bertujuan untuk perbaikan tugas akhir ini sangat diharapkan, sehingga menjadi tugas akhir yang baik.

Pontianak, 07 Juni 2023

Riska Anissaa
NIM B1011191036

PENGARUH INFRASTRUKTUR, TENAGA KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KALIMANTAN BARAT

Oleh : Riska Anissa
Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Pembangunan wilayah yang baik semestinya bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam jangka panjang (Abdoellah, 2016). Hal ini kemudian akan mampu memberi pondasi kuat bagi perekonomian suatu wilayah. Terdapat beberapa negara yang pernah menikmati masa kejayaan namun kemudian gagal untuk mempertahankannya. Fenomena ini terjadi akibat lemahnya pondasi pembangunan yang dimiliki. Negara atau wilayah yang gagal ini terlalu mengandalkan sumber daya alam yang pada masanya mampu memberikan keuntungan ekonomi yang besar. Oleh karena itu pembangunan ekonomi perlu ditopang kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas bagus akan mampu menopang perekonomian suatu wilayah, tidak hanya mempertahankan namun juga bisa membawanya ke tujuan yang bermanfaat. Oleh sebab itu upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu dilakukan dengan memperhatikan instrumen kebijakan pembangunan infrastruktur serta tenaga kerja yang mumpuni pada bidang pendidikan dan kesehatan.

2. Permasalahan

Pengembangan kualitas sumber daya manusia perlu diperhatikan dalam rangka memberikan pondasi yang kokoh pada pembangunan ekonomi suatu wilayah. Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) paling rendah diantara provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Bahkan jika dibandingkan dengan rata-rata seluruh Indonesia, kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat masih jauh tertinggal. Kemudian hasil penelusuran pada penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan hasil temuan pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Data variabel infrastruktur pendidikan, kesehatan, pengeluaran pemerintah serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Barat menunjukkan kecenderungan bertumbuh setiap tahunnya, namun pada tiga tahun terakhir yaitu 2019-2021 pertumbuhannya terlihat adanya perlambatan. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merasa penelitian lebih lanjut perlu dilakukan guna melihat lebih jauh terkait pengaruh infrastruktur dan tenaga kerja bidang pendidikan dan kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan

terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Barat.

3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Menguji dan menganalisis pengaruh infrastruktur pendidikan berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)?
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh infrastruktur kesehatan berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)?
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tenaga kerja pendidikan berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)?
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tenaga kerja kesehatan berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)?
- 5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)?
- 6) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)?

4. Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk kausal asosiatif. Penelitian asosiatif bertujuan untuk melihat hubungan atau pengaruh yang dihasilkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jenis data yang diaplikasikan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data yang penulis gunakan berbentuk data panel. Penulis mengambil data dengan metode penelitian perpustakaan (library research). Metode ini merupakan pengambilan data yang bersumber dari publikasi resmi yang dimana dalam penelitian ini datanya bersumber dari badan pusat statistik (BPS) Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan dua bentuk variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Infrastruktur pendidikan (IP), Infrastruktur kesehatan (IK), Tenaga pendidik (TP), dan Tenaga kesehatan (TK), Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (PBK) dan Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (PBP) kemudian variabel dependennya adalah Sumber Daya Manusia yang dicerminkan melalui Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

5. Hasil Penelitian

Berdasarkan uji asumsi klasik diperoleh hasil bahwa data yang terdapat di dalam penelitian ini terdistribusi normal dan terbebas dari masalah normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, serta autokorelas. Penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda dengan model terbaiknya adalah Fixed Effect Model (FEM) Hasil penelitian memperoleh bahwa secara parsial variabel Infrastruktur pendidikan (IP), Tenaga Kesehatan (TK) dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (PBK) berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang kota/kab di Kalimantan Barat. Sedangkan variabel, Infrastruktur Kesehatan (IK), Tenaga Kesehatan (TK), dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (PBK) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. kemudian secara simultan variabel bebas dalam penelitian ini berpengaruh sebesar 98,4781% sedangkan 1,5219% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

6. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian pengaruh infrastruktur, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat. Infrastruktur Pendidikan (IP) memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur kesehatan (IK) memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Tenaga pendidik (TP) memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Tenaga Kesehatan (TK) memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (PBP) memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Serta Pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan (PBK) memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu dilakukan perbaikan maupun (IP), Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) maka dari itu diharapkan pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan (IK) yang ada di Kalimantan Barat agar terciptakan masyarakat yang sehat. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) maka dari itu pemerintah harus lebih memperhatikan jumlah tenaga pendidik (TP) di suatu daerah apakah sudah sesuai dengan peningkatan para peserta didik. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) maka dari itu pemerintah yang memegang peran penting harus terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja kesehatan (TK) guna peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kalimantan Barat. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, maka pemerintah perlu memperhatikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (PBP) diharapkan dapat memperbaiki ataupun menambah akses dan fasilitas di bidang pendidikan seperti pembangunan infrastruktur pendidikan (sekolah) serta pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu agar mendapatkan sekolah gratis sesuai dengan usia wajib sekolah. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah daerah diharapkan dapat terus menyalurkan dana untuk memperbaiki ataupun menambah akses dan fasilitas dibidang kesehatan seperti pembangunan infrastruktur kesehatan (rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik) serta memberi bantuan kepada masyarakat kurang mampu agar mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT	i
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR YURIDIS.....	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	1
1. PENDAHULUAN	2
2. KAJIAN LITERATUR	9
2.1 Tinjauan Empiris.....	9
2.2 Kajian Empiris	16
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian.....	17
3. METODE PENELITIAN.....	18
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Hasil Penelitian.....	22
4.2 Pembahasan.....	29
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	35
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Kalimantan Tahun 2021 (Persen)	3
Tabel 1.2 Jumlah Sekolah di Kalimantan Barat Tahun 2016-2021 (Unit)	5
Tabel 1.3 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Kalimantan Barat Tahun 2016-2021 (Ribu Rupiah).....	8
Tabel 1.4 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2021 (Jutaan Rupiah)	9
Tabel 3.1 Definisi Operasional Masing-masing Variabel.....	19
Tabel 4.1 Hasil Uji Autokorelasi	22
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas	23
Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas	23
Tabel 4.4 Hasil Uji Penentuan Model Regresi	24
Tabel 4.5 Hasil Regresi Fixed Effect Model.....	24
Tabel 4.6 Pengaruh Infrastruktur Pendidikan (IP) , Infrastruktur Kesehatan (IK), Tenaga Pendidik (TP), Tenaga Kesehatan (TK), Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PBP) dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (PBK) terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	26
Tabel 4.7 Hasil Uji F-statistik	28
Tabel 4.8 Uji Keofisien Determinan (R ²).....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat Tahun 2016-2021 (Persen)	4
Gambar 1.2 Jumlah Unit Kesehatan di Kalimantan Barat Tahun 2016-2021 (unit)	5
Gambar 1.3 Jumlah Tenaga Pendidik di Kalimantan Barat Tahun 2016-2021 (Jiwa)	6
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	17
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas	22

PENGARUH INFRASTRUKTUR, TENAGA KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP SUMBER DAYA MANUSIA DI KALIMANTAN BARAT

¹Riska Anissa

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of education infrastructure, health infrastructure, education workforce, health workforce, government spending on education and government spending on health on the quality of human resources (HR) in West Kalimantan. The form of this research is associative causal using secondary data types obtained from the publication of the Central Bureau of Statistics (BPS) in the form of panel data consisting of cross section data on 14 Regencies/Cities in West Kalimantan and time series from 2016-2021. The analytical method in this study used multiple linear regression tests using the Eviews 9 analysis tool. The most appropriate model used in this study was the Fixed Effect Model (FEM). The results of the study show that education infrastructure, health personnel and government spending on health have a significant and positive effect. Meanwhile, health infrastructure and education personnel have no significant and negative effect, and government spending on education does not have a significant and positive effect. Simultaneously it has a significant effect on HR in West Kalimantan.

Keywords: *Infrastructure, Manpower, Government Spending, Education, Health, Quality of Human Resources*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, tenaga kerja pendidikan, tenaga kerja kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Barat. Bentuk penelitian ini adalah kausal asosiatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) berupa data panel yang terdiri dari data cross section pada 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dan time series dari tahun 2016-2021. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda dengan menggunakan alat analisis Eviews 9. Adapun model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan, tenaga kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan dan positif. Sedangkan infrastruktur kesehatan dan tenaga pendidikan tidak berpengaruh signifikan dan negatif serta pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan dan positif. Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap SDM di Kalimantan Barat.

Kata kunci: *Infrastruktur, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, Kesehatan, Kualitas SDM*

¹ riskaanissa@student.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah yang baik semestinya bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam jangka panjang (Abdoellah, 2016). Hal ini kemudian akan mampu memberi pondasi kuat bagi perekonomian suatu wilayah. Terdapat beberapa negara yang pernah menikmati masa kejayaan namun kemudian gagal untuk mempertahankannya. Fenomena ini terjadi akibat lemahnya pondasi pembangunan yang dimiliki. Negara atau wilayah yang gagal ini terlalu mengandalkan sumber daya alam yang pada masanya mampu memberikan keuntungan ekonomi yang besar. Namun kemudian mereka seakan lupa bahwa yang diandalkan adalah sumber daya yang sifatnya terbatas sehingga bisa saja habis sewaktu-waktu. Selain itu beberapa jenis sumber daya alam khususnya yang bukan merupakan kebutuhan primer juga bersifat temporer. Tidak selamanya sumber daya tersebut akan dibutuhkan oleh manusia, sehingga ada potensi penurunan nilai yang berdampak buruk bila suatu negara terlalu menggantungkan perekonomiannya hanya pada sumber daya alam (Purba, 2021). Oleh karena itu pembangunan ekonomi perlu ditopang kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni.

Sumber daya manusia yang memiliki kualitas bagus akan mampu menopang perekonomian suatu wilayah, tidak hanya mempertahankan namun juga bisa membawanya ke tujuan yang bermanfaat. Meruntut pada semacam indikator penilaian kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengindikasikan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik di suatu wilayah (Haq, 1995). Dengan sumber daya manusia yang baik, suatu wilayah sudah bisa disebut sebagai wilayah yang sudah memiliki pondasi pembangunan ekonomi yang memadai.

Pentingnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadikan indikator ini sebagai salah satu fokus yang perlu untuk diupayakan pemerintah terkait pertumbuhannya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur dari akumulasi bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat yang masing-masing trindikasi melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan pengeluaran perkapita (BPS Indonesia, 2022). Oleh sebab itu upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu dilakukan dengan memperhatikan instrumen kebijakan pembangunan infrastruktur serta tenaga kerjayang mumpuni pada bidang pendidikan dan Kesehatan.

Meskipun secara matematis sektor pendidikan dan kesehatan merupakan komponen penyusun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun dari beberapa temuan terdahulu ada juga yang menunjukkan hasil bahwa infrastruktur bidang pendidikan dan kesehatan tidak selalu menjadi regresor yang signifikan untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam penelitian Sinaga (2020) ditemukan bahwa pengaruh infrastruktur pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Lalu pada penelitian serupa Rosyid (2019) menemukan bahwa infrastruktur pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun demikian, terdapat juga penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa infrastruktur bidang pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hai ini ditemukan pada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Mohanty (2016), Nurmalasari (2017), dan Susanto (2021).

Penelitian terdahulu terkait pengaruh tenaga pendidik dan tenaga kesehatan juga menunjukkan hasil yang berbeda satu dengan yang lainnya. Mohanty (2019) menemukan bahwa jumlah guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan jumlah tenaga kesehatan tidak berpengaruh signifikan. Sementara itu Primadani (2022) menemukan bahwa jumlah guru tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meski begitu terdapat pula temuan terdahulu yang mengataka bahwa tenaga pendidik dan tenaga kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu dalam penelitian Hamdan (2019).

Agar mendapatkan penelitian yang lebih terfokus, perlu dipilih wilayah yang lebih spesifik untuk diteliti terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pulau Kalimantan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki persebaran data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cukup timpang antara satu provinsi dengan provinsi lainnya yaitu mencapai 8,98 (BPS Indonesia, 2022). Berikut ini data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap provinsi di Pulau Kalimantan.

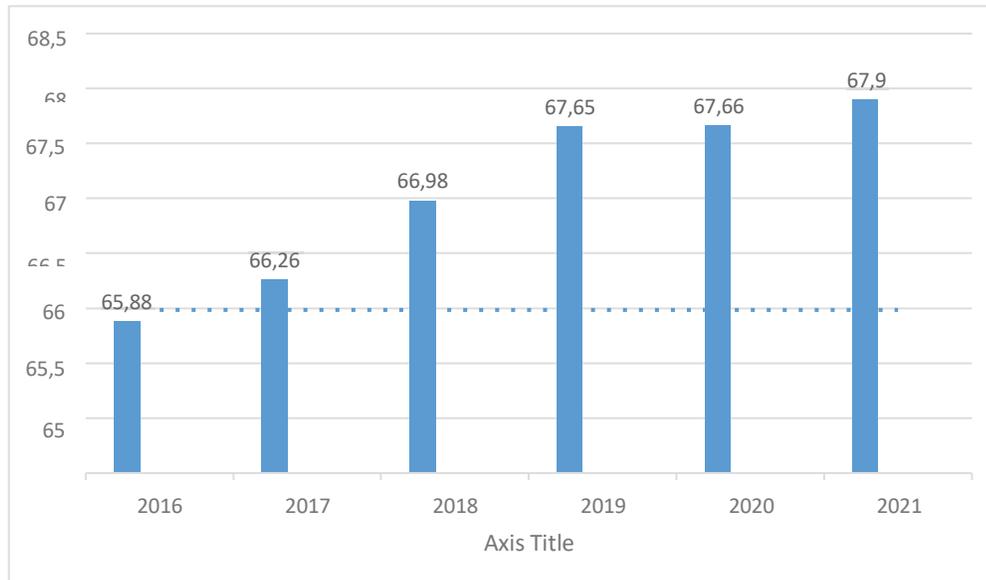
Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Kalimantan Tahun 2021 (Persen)

No.	Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia
1	Kalimantan Barat	67,90
2	Kalimantan Tengah	71,25
3	Kalimantan Selatan	71,28
4	Kalimantan Timur	76,88
5	Kalimantan Utara	71,19

Sumber: BPS Indonesia, 2022

Manusia (IPM) setiap provinsi di Pulau Kalimantan. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan level kualitas sumber daya manusia di Pulau Kalimantan. Provinsi dengan kualitas sumber daya manusia paling baik di Pulau Kalimantan adalah Kalimantan Timur yaitu 76,88. Kalimantan Barat menjadi yang paling rendah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya 67,90. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat ini berpotensi menjadi bencana pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu perlu diteliti lebih jauh terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga kemudian dapat diberikan saran terkait kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka memberikan pondasi pembangunan ekonomi yang kokoh.

Provinsi Kalimantan Barat diputuskan sebagai fokus wilayah dalam penelitian terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kemudian untuk melihat lebih jauh keadaan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Barat, berikut ini disajikan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupten/Kota di Kalimantan Barat.



Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat Tahun 2016-2021 (Persen)

Sumber: BPS Kalbar, 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1 Dapat dilihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat, yang mana hal ini mencerminkan level kualitas sumber daya manusia sejak tahun 2016 hingga 2021. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat selalu mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, namun terlihat pada tiga tahun terakhir sejak 2019 pertumbuhannya mengalami perlambatan. Hal ini tentu memberi sinyal buruk bagi pemerintah daerah Kalimantan Barat di tengah upaya mengejar ketertinggalan pada aspek sumber daya manusia dari provinsi-provinsi lain di Indonesia, khususnya Pulau Kalimantan.

Beberapa indikator yang digunakan dalam perhitungan matematis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) salah satunya adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang mana kedua hal ini merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pendidikan suatu wilayah (Malik, 2014). Oleh sebab itu penting bagi pemerintah daerah untuk bisa menentukan strategi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan wilayahnya. Salah satu strategi kebijakan yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di suatu wilayah adalah pembangunan infrastruktur pada bidang pendidikan. Semakin baik infrastruktur di bidang pendidikan, maka hal ini akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya.

Infrastruktur yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas diharapkan mampu menjangkau seluruh persebaran lokasi masyarakat sehingga memberi kesetaraan ilmu bagi seluruh masyarakat Indonesia (Mohanty, 2016). Kemudian kualitas infrastruktur yang memadai juga akan turut meningkatkan efektivitas prosen pembelajaran. Untuk melihat lebih jauh perkembangan infrastruktur bidang pendidikan di Kalimantan Barat, berikut ini disajikan data jumlah sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA)/ sederajat dari tahun 2016-2021.

Tabel 1.2 Jumlah Sekolah di Kalimantan Barat Tahun 2016-2021 (Unit)

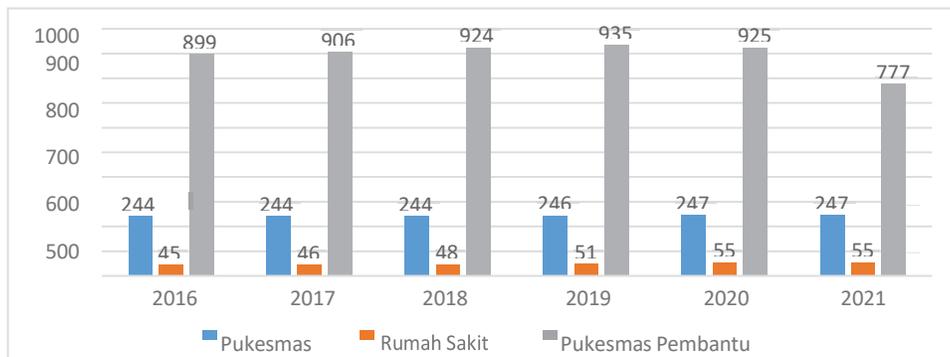
Tahun	SD	SMP	SMA/Sederajat
2016	4367	1278	543
2017	4381	1295	605
2018	4419	1323	617
2019	4426	1323	658
2020	4405	1336	662
2021	4428	1353	667

Sumber: BPS Kalbar, 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat perkembangan jumlah sekolah di Kalimantan Barat. Data ini dapat merepresentasikan keadaan infrastruktur pendidikan yang bersumber dari gabungan SD, SMP, dan SMA di Kalimantan Barat dari segi kuantitas. Meskipun jumlahnya cenderung bertumbuh setiap tahunnya, namun pertumbuhan pada perguruan tinggi sempat melambat di tahun 2016-2021, bahkan pada tahun 2020 terlihat jumlah perguruan tinggi di Kalimantan Barat mengalami sedikit penurunan. Hal ini tentu dapat berdampak buruk pada upaya pemerintah dalam mengejar ketertinggalan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari provinsi lain yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan.

Selain indikator pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH) dalam perhitungan matematisnya. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator yang mencerminkan keadaan kesehatan di suatu wilayah. Artinya kualitas kesehatan masyarakat memegang peranan penting dalam perkembangan kualitas sumber daya manusia. Sehingga kebijakan di bidang kesehatan dirasa perlu diberi perhatian lebih oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang bisa dikontrol oleh pemerintah demi mencapai tujuan pembangunan sumber daya manusia yang baik pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur bidang kesehatan yang memadai akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan masyarakat. Infrastruktur kesehatan dapat berupa rumah sakit dan puskesmas (Nurmalasari, 2017). Semakin banyak dan merata persebaran rumah sakit dan puskesmas suatu wilayah diharapkan akan mampu mempermudah akses dan jangkauan seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Untuk melihat lebih jauh perkembangan infrastruktur kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat, berikut ini disajikan data jumlah rumah sakit dan puskesmas antara tahun 2016-2021.

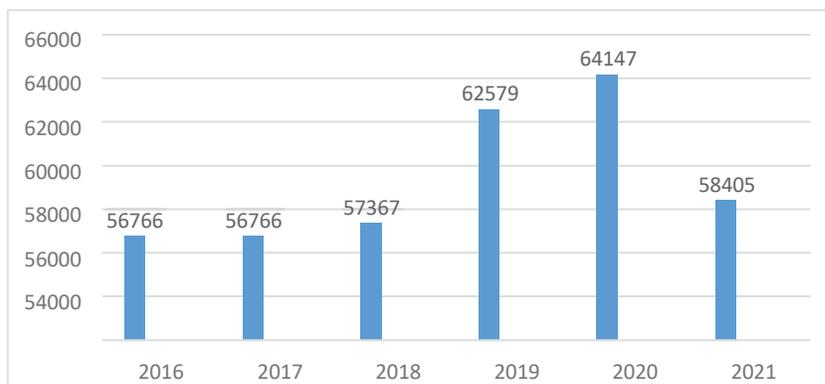


Gambar 1.2 Jumlah Unit Kesehatan di Kalimantan Barat Tahun 2016-2021 (unit)
 Sumber: BPS Kalbar, 2021

Berdasarkan Gambar 1.2 terdapat 2 unit kesehatan di Kalimantan Barat yang terus bertambah di setiap tahunnya. 2 unit kesehatan ini adalah rumah sakit dan puskesmas yang tersebar di Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini tentu akan berdampak baik pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat. Namun demikian, perkembangan penambahan jumlah unit puskesmas pembantu mengalami kondisi yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan adanya adaptasi jumlah unit puskesmas pembantu yang terus beradaptasi dengan kebutuhan kesehatan dari masyarakat yang terdapat pada wilayah kerja dari puskesmas yang tersebar di Kalimantan Barat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan mampu memberi ruang lebih banyak untuk bisa melakukan pelayanan yang maksimal pada setiap masyarakat yang membutuhkannya.

Keberadaan infrastruktur fisik perlu didukung dengan tenaga operasional. Pada bidang pendidikan, tenaga operasional yang digunakan adalah guru atau tenaga pendidik. Tenaga pendidik memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari bidang pendidikan (Haq, 1995). Oleh karena itu selain infrastruktur fisik bidang pendidikan, penelitian terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga perlu memperhatikan jumlah tenaga pendidik sebagai variabel bebas yang turut mempengaruhinya. Jumlah tenaga pendidik yang memadai tentu akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi jumlah tenaga pendidik, maka beban yang ditanggung oleh setiap tenaga pendidik untuk mendidik para peserta didik akan semakin ringan. Hal ini karena tenaga pendidik bisa fokus pada peserta didik yang rata-rata jumlahnya lebih sedikit. Di sisi lain hal ini juga akan membuat setiap peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran karena jumlah peserta yang lebih kondusif.

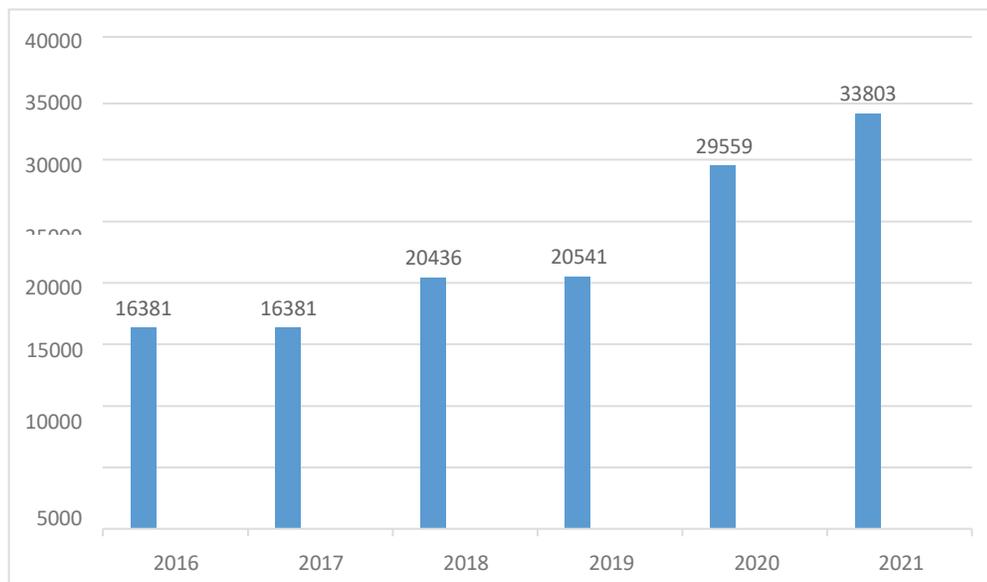
Beberapa temuan pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tenaga pendidik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mana hal ini ditemukan pada penelitian Hamdan (2019) dan Mohanty (2016). Meskipun demikian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Melliana (2013) menunjukkan bahwa pengaruh tenaga pendidik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk melihat lebih jauh perkembangan tenaga pendidik di Provinsi Kalimantan Barat, berikut ini disajikan data tenaga pendidik yang meliputi total dari gabungan jumlah guru Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) antara tahun 2016-2021:



Gambar 1.3 Jumlah Tenaga Pendidik di Kalimantan Barat Tahun 2016-2021 (Jiwa)
Sumber: BPS Kalbar, 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.3 Jumlah tenaga pendidik di Kalimantan Barat menunjukkan data yang fluktuatif. Jumlah tenaga pendidik di Kalimantan Barat terjadi pada tahun 2020 dengan total 64.147 orang. Sedangkan 56.766 menjadi jumlah tenaga pendidik paling sedikit di Kalimantan barat, angka ini terjadi pada tahun 2017. Fluktuasi jumlah tenaga pendidik di Kalimantan Barat ini tidak begitu baik ditengah ketertinggalan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Barat dibandingkan provinsi lainnya.

Selain pada bidang pendidikan, tenaga operasional bidang kesehatan juga perlu diperhatikan guna menopang pertumbuhan jumlah infrastruktur yang ada. Tenaga operasional bidang kesehatan meliputi Perawat, Bidan, Dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Tenaga kesehatan memiliki peran yang tidak dapat digantikan oleh infrastruktur apa pun. Kesehatan tidak hanya menyangkut fisik, tapi juga mental manusia. Sehingga perlu pendekatan psikologis juga dalam dunia kesehatan disamping pengobatan medis. Dibandingkan harus saling menggantikan, infrastruktur dan tenaga kesehatan adalah dua hal yang saling melengkapi. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan tentu akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini akan turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebab kesehatan merupakan salah satu bidang yang dipakai dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal inisejalan dengan temuan dalam penelitian Hamdan (2019). Namun Mohanty (2016) menemukan hubungan yang tidak signifikan antara tenaga pendidik dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk melihat lebih jauh perkembangan tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat, berikut ini disajikan data jumlah Perawat, Bidan, Dokter, dan tenaga kesehatan lainnya antara tahun 2016-2021:



Gambar 1.4 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kalimantan Barat Tahun 2016-2021 (Jiwa)
Sumber: BPS Kalbar, 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.4 Jumlah tenaga kesehatan di Kalimantan Barat cenderung bertumbuh dari tahun ke tahunnya. Terlebih pada tahun 2020 dan 2021 yang menunjukkan peningkatan sangat pesat dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena penyebaran COVID-19 yang mulai masif di Indonesia. Dalam rangka penanganan

pandemi COVID-19, kebutuhan akan tenaga kesehatan sangatlah besar. Sejak tahun 2015 jumlah tenaga kesehatan terus menurun hingga 2017. Meskipun kemudian meningkat pada tahun 2018, jumlah tenaga kesehatan di Kalimantan Barat kembali menurun di tahun 2019 sebelum akhirnya meningkat pesat karena COVID-19.

Selain pada kondisi dari jumlah dari tenaga operasional bidang kesehatan, alokasi pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan juga menjadi faktor penunjang dari kontribusinya terhadap pembentuk kualitas sumber daya manusia dalam hal ini dicerminkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan mempunyai kegunaan sebagai alokasi dana di bidang pelayanan kesehatan berupa pelayanan dan fasilitas kesehatan yang merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Sedangkan, pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan memiliki kegunaan sebagai alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pemenuhan pelayanan pendidikan kepada masyarakat agar terwujudnya peningkatan dari segi kesejahteraan manusia dalam memperoleh pendidikan (Fajar & Indrawati, 2020).

Dalam pengaruhnya terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan mempunyai peranan yang berbeda akan tetapi memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat itu sendiri. Untuk melihat seberapa jauh pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan dan pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat, berikut disajikan data pengeluaran pemerintah bidang kesehatan antara tahun 2011-2021.

Tabel 1.3 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Kalimantan Barat Tahun 2016-2021 (Ribu Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan
2016	219.492.688
2017	153.213.826
2018	189.121.000
2019	1.326.746.551
2020	89.183.428.000
2021	12.028.081.100

Sumber: BPS Kalbar, 2022

Berdasarkan Tabel 1.3 pengeluaran bidang kesehatan di Kalimantan Barat cenderung mengalami kondisi yang fluktuatif di sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2021. Adapun dibalik fluktuatifnya alokasinya pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan ini karena adanya penyesuaian kebutuhan anggaran di instansi pemerintah yang menangani permasalahan bidang kesehatan. Hal ini menjadi sejalan pada tahun 2020 dan 2021 yang dimana alokasi pengeluaran pemerintah pada fungsi kesehatan dan menjadi meningkat karena adanya fokus penanganan Pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat (Kemenkeu, 2021).

Selain pada bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan juga memegang peranan penting dalam memajukan kualitas Sumber Daya Masyarakat (SDM). Untuk melihat seberapa jauh perkembangan realisasi pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat, berikut disajikan data pengeluaran bidang kesehatan antara tahun 2011-2021.

Tabel 1.4 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2021 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan
2016	960.470.110
2017	500.253.569
2018	900.350.000
2019	937.495.950
2020	7.788.266.820
2021	7.262.340.510

Sumber: BPS Kalbar, 2022

Berdasarkan Tabel 1.4 pengeluaran bidang pendidikan di Kalimantan Barat cenderung mengalami kondisi yang fluktuatif di sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2021. Menurut laporan Kementerian Keuangan, pada tahun 2021 jumlah alokasi anggaran meningkat drastis bisa terjadi karena adanya upaya penanganan dampak dari Pandemi COVID-19 yang sumber dananya berasal dari DAK Non Fisik (BOS) pada ruang lingkup wilayah Kalimantan Barat. Alokasi anggaran tersebut sebagai upaya pencegahan dan penanganan/bantuan langsung khususnya Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang harus tetap berlangsung untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Berbagai sarana dan prasarana untuk mempermudah atau meringankan beban orang tua siswa harus ditanggung beban APBN. BOS ini diharapkan dapat menopang keberlangsungan sistem pendidikan nasional secara massif dan merata bagi warga masyarakat khususnya lapisan bawah dengan kondisi perekonomian yang semakin terpuruk akibat dari dampak Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 dan 2021 (Kemenkeu, 2021).

Pemerintah senantiasa melakukan pengeluaran belanja pembangunan sebagai langkah untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Belanja pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Tujuan dari pembangunan salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (Dumairy, 1999).

Berdasarkan latar belakang diatas, menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat seberapa jauh dari perkembangan pengaruh infrastruktur pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Barat.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Tinjauan Empiris

2.1.1 Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan dapat dilihat dalam perspektif dan ukuran yang berbeda, oleh karena itu diperlukan persamaan persepsi dan kriteria dalam melihat makna pembangunan. Pembangunan pada awalnya hanya diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai wujud tingkat kesejahteraan penduduk yang